

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arifin, Z. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 289–305.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022). *Pedoman penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak*. KemenPPPA.
- Lianto, V. T., Firdausy, A. G., & Madalina, M. (2024). Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan Kabupaten Magetan Layak Anak. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(4), 93–105.
- Mukhlis, M., Muammar, M., & Maghfirah, F. (2025). Towards a child-friendly city in East Aceh through collaborative governance and local challenges. *Academia Open*, 10(1), 1–14.
- Ndraha, T. (2011). *Ilmu pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pemerintah Kabupaten Bone. (2023). *Kabupaten Bone Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Nindya*.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Prafitri, N., Rizkiyanti, T., & Rahayu, S. (2024). *Tata kelola kebijakan kota layak anak pada kluster kesehatan dan kesejahteraan di Kota Cilegon*. Antasena: Governance and Innovation Journal, 3(1), 21–34.
- Putri, A. N., & Syamsuddin. (2023). Peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam perlindungan hak anak. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 22–35.
- Putri, D. A., & Suryanto, T. (2023). Tantangan Implementasi Kebijakan Publik di Tingkat Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 27(1), 1–14.
- Rahmayanti, D., & Suryani, E. (2021). Implementasi kebijakan perlindungan anak oleh pemerintah daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 6(1), 88–101.



at, R. (2022). Koordinasi Lintas Sektor dalam Implementasi Kebijakan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 55–68.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

Sari, R., & Hadi, M. (2022). Implementasi program kabupaten layak anak di tingkat pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 145–158.

Utami, S. (2022). Kabupaten layak anak sebagai instrumen pembangunan berbasis hak anak. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 11(2), 65–78.

Winarno, B. (2021). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.

Buku;

Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.

Nugroho, R. (2021). Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Winarno, B. (2020). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.

Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). Laporan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2023. Jakarta: KemenPPPA RI.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). Petunjuk Teknis Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak. Jakarta: KemenPPPA RI.

Jurnal Ilmiah;

Hidayat, R., & Nurhasanah. (2021). Implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di tingkat pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 123–135.



(2022). Peran pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak melalui upaten Layak Anak. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 45–58.

Implementasi kebijakan perlindungan anak berbasis kolaborasi lintas I Kebijakan Publik, 14(2), 201–215.

- Sari, M., & Abdullah, A. (2024). Tantangan implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di daerah. *Jurnal Governance dan Politik Publik*, 11(1), 67–82.
- Fauzi, A., & Rahman, I. (2023). Evaluasi implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di tingkat pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 8(2), 101–115.
- Herlina, S., & Pratama, R. (2023). Koordinasi lintas sektor dalam perlindungan anak di daerah otonom. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 7(1), 45–60.
- Kurniawan, D., & Sulastri, N. (2024). Implementasi kebijakan perlindungan anak berbasis hak anak di tingkat kabupaten. *Jurnal Governance dan Pelayanan Publik*, 11(1), 89–104.
- Putra, M. A., & Lestari, E. (2024). Peran OPD dalam mendukung keberhasilan Kabupaten Layak Anak. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 12(2), 133–148.
- Safitri, R., & Anwar, K. (2024). Tantangan implementasi kebijakan KLA dalam konteks koordinasi antar lembaga daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 9(1), 55–70.
- Wijaya, T., & Hapsari, D. (2025). Perlindungan anak korban kekerasan dan peran pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan. *Jurnal Sosial, Politik, dan Humaniora*, 13(1), 1–16.

